

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang telah disiapkan satu tahun sebelumnya adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 7) Permendagri No. 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 12) Pergub Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (2020) dan untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran sehingga dana APBD yang teralokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021 ini dapat terserap secara optimal untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan baik di dalam dokumen RPJMD maupun di dalam dokumen renstra.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS APBD) Tahun 2021 .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 - d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
3. Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - b. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
4. Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. BAB IV PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam mengevaluasi pelaksanaan seluruh program Lingkungan Hidup, dapat dilihat melalui tercapainya indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dan memberikan gambaran peranan lingkungan hidup terhadap prioritas pembangunan daerah, sehingga upaya untuk mendorong keterkaitan antara program terus dilaksanakan, dimana keberhasilan satu program akan meningkatkan keberhasilan program lainnya, dan sebaliknya kegagalan salah satu program juga akan menurunkan capaian keberhasilan program lainnya. Dengan demikian sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup.

DLH Prov. Sumbar pada tahun 2019 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 14.515.217.520,- dengan rincian dan realisasi terlihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Pagu Dana Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa Dana (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	8.377.608.459	7.994.444.272	87,04	100	
2	Belanja Langsung	14.515.217.520	13.934.845.577	96	100	
	a. BL Pokok	4.943.422.489	4.794.752.581	96,22	100	
	b. BL Kegiatan	9.517.795.031	9.140.092.996	96,03	100	
	TOTAL	22.892.825.979	21.929.289.849	95,79	100	

DLH prov. Sumbar pada tahun 2019 telah melaksanakan 5 (lima) program utama yang tercantum dalam penetapan Kinerja. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD DLH tahun 2019 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Sampai dengan akhir tahun 2019, dari 10 program dan 58 kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH realisasi fisiknya hanya mencapai 99,63% dan realisasi anggaran sebesar 96%. Realisasi fisik kegiatan yang tidak mencapai 100% ini disebabkan karena adanya 2 kegiatan yang belum final dan tidak jadi dilaksanakan yakni :
 - kegiatan Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup Perda RPPLH belum bisa diterbitkan/diundangkan karena terkendala tidak adanya dana pembahasan draft perda RPPLH di Biro Hukum.
 - Kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan Penyusunan KLHS RPJPM tidak jadi dilaksanakan disebabkan karena revisi dokumen RPJPM juga tidak jadi dilakukan.
- b. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan Renja OPD DLH tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2017-2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Tahun berjalan (2019)			
			Target	Unit	Realisasi	Unit	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan /tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11)=(10/4)
	Lingkungan Hidup													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran												
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	60	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	52	60%
	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	60	bulan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	52	60%
	Penyediaan jasa kebersihan, Pengaman dan sopir kantor	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga pengaman dan sopir kantor	52	bulan	0	bulan	0	bulan	12	bulan	0%	12	12	42%
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik/penarangan	43	komponen	6	komponen		komponen		komponen	100%		28	65%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/surat kabar harian yang disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
	Penyediaan makan dan minum	Tersedianya makan dan minum kantor	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	-

			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah, pelaksanaan Bintek dan sosialisasi dalam dan luar propinsi	terlaksananya konsultasi dan koordinasi kedalam dan luar provinsi	189	kali	37	kali	41	kali		kali	100%		165	-
			Penyediaan Tenaga Sopir	Pembayaran honorarium Jasa tenaga Sopir	13	bulan	13	bulan	0	bulan	0	bulan	100%	0	13	100%
			Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Pembayaran honorarium Jasa Pengaman Kantor	13	bulan	13	bulan	0	bulan	0	bulan	100%	0	13	100%
			Penyediaan jasa kebersihan	Pembayaran honorarium Jasa kebersihan	13	bulan	13	bulan	0	bulan	0	bulan	100%	0	13	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Pembayaran jasa informasi dokumentasi dan publikasi	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
			Penataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	40	m lari	0	m lari	0	m lari	0	m lari	0%	0	0	-
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya					10 1	Kendaraan roda 4 Bangunan kantor	10 1	Kendaraan roda 4 Bangunan kantor				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur												
			Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor bapedalda	2	paket	2	paket	0	-	0	-	0%	0	2	100%
			Pengadaan meubeleur	Jumlah unit meubeleur yang di adakan	16	jenis	3	jenis	6	jenis	6	jenis	100%	9	7	-
			Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya PC dan laptop/note book, printer, scanner	18	jenis	4	jenis	5	jenis	4	jenis	100%	9	8	-
			Pengadaan kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan yang diadakan roda empat roda dua	2	unit	3	unit	0	unit	0	unit	100%	3	3	150%
			Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat studio dan Komunikasi dan informasi	32	unit	11	unit	7	unit	7	unit	100%	18	18	-
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan kantor, pemeliharaan pekarangan	37	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100%	1	9	24%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Tersedianya suku cadang dan pajak/STNK serta asuransi kendaraan	32	unit	6	unit	9	unit roda empat	9	unit roda empat	100%	7	25	78%
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%

				Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	0	jenis	-	jenis	-	jenis	-	-	-	0	0	-
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, komputer dan jaringan komputerisasi	133	unit	54	unit	25	unit	47	unit	188%	76	177	133%
				Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian aset SKPD	48	bulan	-	bulan	-	bulan	-	bulan	-	-	-	-
				Penataan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip Bapedalda	10	m lari	-	m lari	-	m lari	-	m lari	-	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	41	jenis	-	jenis	4	jenis	4	jenis	100%	4	10	24%
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas												
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	334	stel	64	stel	82	stel	82	stel	100%	82	213	64%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur												
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	72	kali	15	kali	18	orang	18	kali	100%	3	23	32%
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	1. Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur 2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) 3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan 4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD 5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD												
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja Bapedalda	44	dokumen	9	dokumen	9	dokumen	9	dokumen	100%	9	26	59%
				Penata usahaan keuangan SKPD	Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12	36	60%
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda	32	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100%	8	16	50%
				Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD; Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD												

		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Bapedalda	7	dokumen	9	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	0%	0	9	129%
		Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Pembayaran honor pengawasan dan pengendalian aset SKPD	12	bulan	12	bulan	-	bulan	-	bulan	0%	0	12	100%
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH											0	
		Pengawasan dan Pengendalian sumber Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah objek/kegiatan yang dilakukan wasdal terhadap kerusakan lingkungan (lahan pertambangan dan lahan akses terbuka)	77	objek	9	objek	13	objek / kegiatan		Objek	0%	10	19	25%
		Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutunya	7	sungai	1	sungai	0	-	0	-	0%	0	1	14%
			Pergub status mutu air sungai lintas kab/kota	-	-	1	pergub	0	-	0	-	0%	0	1	
		Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai yang dipantau	72	sungai	8	sungai	9	sungai	9	sungai		5	22	31%
			Jumlah danau yang dipantau		danau	0	danau	0	danau	0	danau	0%	2		
		Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai	Terbentuknya rencana teknis pemulihan sungai Batang Agam (klaster pengelolaan limbah cair)	11	klaster	1	klaster	0	klaster pengelolaan limbah cair domestik	0	klaster pengelolaan limbah cair domestik	0%	0	1	9%
			Jumlah peserta sosialisasi klaster	60	orang	60	orang	0	-	0	-	0%	0	60	100%
		Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	110	kegiatan / usaha	27	kegiatan / usaha	18	kegiatan / usaha	20	kegiatan/ usaha	111%	0	47	43%
		Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	108	kegiatan	30	kegiatan	13	objek/kegiatan	13	objek/kegiatan	100%	13	56	52%
		Pemantauan Kualitas Udara Ambient	Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya	114	kab/kota	18	kab/kota	19	Kab/Kota	19	Kab/Kota	100%	10	47	41%
		Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	94	kab/kota	14	kab/kota	12	Kab/Kota	14	kabupaten/kota	117%	13	41	44%
		Peningkatan Program Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.	Jumlah Kab/Kota yang teridentifikasi pemakaian bahan perusak ozon pada bengkel service peralatan pendingin	101	kab/kota	32	kab/kota	0	-	0	-	0%	0	32	32%

			Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R dan jumlah bank sampah yang dibangun	113	kab/kota	37	kab/kota	0	Kab/Kota	0	kab/kota	0%	0	37	33%
			Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Terlaksananya penilaian kecamatan/kelurahan bersih Tk. Provisi	107	kel/kec	49	Kecamatan kelurahan	28	Kecamatan kelurahan	26	Kecamatan kelurahan	100% 100%	0	75	46%
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	114	kab/kota	38	kab/kota	12	kab/kota	12	kab/kota	100%	0	50	44%
			Peningkatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Jumlah kab/kota yang laboratorium/Laboratorium DAK dilakukan pembinaan	11	kab/kota	11	kab/kota	0	laboratorium	0	laboratorium	0%	0	11	100%
				Jumlah peserta Bimtek Akreditasi Laboratorium	19	orang	19	orang	0	orang	0	orang	0%	0	19	100%
			Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,	420	orang	147	orang	64	orang peserta	64	orang	100%	0	211	50%
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	114	kab/kota	35	kab/kota	19	kab/Kota	19	Kab/Kota	100%	0	54	47%
			Program Kampung Iklim	Jumlah Nagari/Jorong/Korong (calon kampung iklim) yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim	27	kab/kota	12	kab/kota	15	kab/kota	15	kab/kota	100%	7	34	126%
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah	Jumlah Kab/Kota yang diinventarisasi data penurunan emisi GRK bidang pengelolaan limbah	38	kab/kota	19	kab/kota	19	Kab/Kota	18	kab/kota	95%	0	37	97%
			Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup	Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	4	klaster	0	klaster	1	klaster	1	klaster	100%	0	1	25%
			Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair dan peruntukan sungai	Jumlah dokumen kajian teknis peruntukan sungai	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	0	1	100%
			Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19	Kab/Kota	0	Kab/Kota	19	Kab/Kota	19	Kab/Kota	100%	0	19	100%
				Jumlah peserta yang mengikuti bintek	0	orang	0	orang	80	orang	80	orang	100%	0	80	#DIV/0!
				Jumlah Pergub yang disusun	0	pergub	0	pergub	1	pergub	1	pergub	100%	0	1	#DIV/0!

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3	212	objek	0	objek	20	objek	33	objek	165%	15	48	23%
	Fasilitasi kerjasama pengelolaan LB3 antar daerah	0	Kab/Kota	0	Kab/Kota	3	Kab/Kota	1	Kab/Kota	33%	0	1	#DIV/0!
Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	69	Kab/Kota	0	Kab/Kota	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota	100%	0	12	17%
	Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	26	Kab/Kota	0	Kab/Kota	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota	100%	0	6	23%
	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan	150	orang	0	orang	55	orang	55	orang	100%	0	55	37%
Pengadaan Peralatan, Supporting laboratorium dan Bahan kimia	Jumlah Pengadaan peralatan, Supporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan	4	paket	0	paket	1	paket	1	paket	100%	1	2	50%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	IKLH												
Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah danau yang dikoordinasikan peran serta stakeholder masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau	4	danau	4	danau	4	danau	4	danau	100%	0	8	200%
Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	Jumlah kab/kota kawasan Pesisir Pantai dan Muara Sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota	6	Kab/Kota	100%	0	12	200%
Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	Jumlah taman kehati yang dibina	4	taman kehati	4	taman kehati	4	taman kehati	4	taman kehati	100%	0	8	200%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup												
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah usulan calon penerima Kalpataru Tk Nasional dari Provinsi Sumbar yang dibina	47	orang/kel	8	orang/kel	9	orang/kelompok	11	orang/kelompok	122%	4	23	49%
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan	Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	160	buku	-	buku	40	buku	40	buku	100%	40	80	50%

				Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Provinsi Sumatera Barat	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis daya dukung daya tampung lingkungan Propinsi Sumatera Barat;	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	0	1	100%
					jumlah dokumen Naskah Akademis yang disusun	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	0	1	100%
				Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Meningkatnya pengelolaan TPA Sampah Regional												
				Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	16	laporan	0	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	2	6	38%
				Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya operasional TPA	8	TPA	0	TPA	2	TPA	2	TPA	100%	2	4	50%

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2018 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas LH Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari capaian kinerja Tahun 2019 berdasar dari cascading yang telah disempurnakan pada triwulan IV Tahun 2019 yang lalu. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran 1			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	67 %	87,23%	130,19%
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	75 %	85%	113,33%
Sasaran 2			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	5 %	4,85%	97,06%
Sasaran 3			
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	20%	19,9%	99,5%
Sasaran 4			
Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	5%	5.93%	119%
Sasaran 5			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Nilai Evaluasi AKIP OPD	BB	BB	100
% Capaian rata-rata			109,84%

Dari tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 6 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2019 adalah 109,84%. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 109,84% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan permasalahan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkungan hidup yang dihadapi Prov. Sumbar maka dirumuskan isu strategis lingkup pelayanan Prov. Sumbar sebagai berikut :

1. Terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya danau maninjau dan danau singkarak. Tekanan terbesar berasal dari limbah domestik baik limbah cair maupun limbah padat. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konsentrasi Fecal Coliform dan Total Coliform di 70,6% titik sampling telah melebihi baku mutu. Disamping itu hasil analisis laboratorium juga menunjukkan bahwa parameter sulfida, COD, BOD, TSS, fosfat, dan Nitrit juga sudah menunjukkan kondisi yang melebihi baku mutu di beberapa sungai yang daerah tangkapan airnya merupakan areal pertanian ataupun perkebunan yang cukup luas dan pemakaian pupuk anorganik di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 169.636,9 ton/tahun yang terdiri atas 63.759,9 ton urea, 12.212,0 ton ZA, 31.383,0 ton SP 36, dan 62.282,0 ton NPK. Secara keseluruhan indeks pencemaran air Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 75,69 kondisi ini lebih baik dari pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,40 dan tahun 2015 sebesar 66,83. Jika dibandingkan dengan IKA di tingkat nasional, kualitas air Provinsi Sumatera Barat juga lebih tinggi dimana IKA nasional Tahun 2017 adalah sebesar 53,2.
2. Terkait masalah limbah dan persampahan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun dan dirasakan oleh hampir seluruh kabupaten/kota. Peningkatan jumlah timbulan sampah bergantung pula pada tingkat ekonomi suatu wilayah. Wilayah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan memiliki kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tinggi pula sehingga akan berdampak terhadap besarnya jumlah timbulan sampah. Setiap tahun jumlah timbulan sampah selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 2.452.213 kg/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman adalah sampah rumah tangga yaitu sampah organik. Kota Padang dan Kota Bukittinggi memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi yakni masing-masing sebesar 494.426 kg/hari dan 183.000 kg/hari.

3. Terkait alih fungsi lahan. Pertumbuhan penduduk memberikan tekanan terhadap perubahan lahan produktif, daerah rawa menjadi perumahan sehingga berdampak pada kemampuan lahan menyerap air. Munculnya isu alih fungsi lahan lebih disebabkan bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertambangan merupakan bentuk alih fungsi lahan terbesar di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2011.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil rancangan awal RKPD belum memenuhi hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup di Tahun 2021. Untuk mengakomodir semua itu, harus adanya penyesuaian terhadap Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table 2.5

Tabel 2.5

Review terhadap rancangan awal rkpd tahun 2020
Provinsi Sumatera Barat

0	RANCANGAN AWAL RKPd (sesuai Renstra)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27.254.000.000					42.629.360.052	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.908.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.700.585.220	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	12 bulan	40.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	12 bulan	441.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	12 bulan	441.000.000	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenagapengamanan dan sopir kantor	13 bulan	640.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenagapengamanan dan sopir kantor	13 bulan	1.400.000.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	70.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	70.008.220	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	15 jenis	50.000.000	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Tersedianya komponen listrik/penerangan	11 komponen	17.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Tersedianya komponen listrik/penerangan	10 komponen	17.000.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Padang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	12 bulan	34.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Padang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	12 bulan	33.265.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	48.000.000	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Padang	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	40 kali	430.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Padang	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	33 kali	430.000.000	
10	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Padang	Terlaksananya penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Padang	Terlaksananya penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	12 bulan	71.312.000	
11	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya	7 kendaraan roda empat	52.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya	10 kendaraan roda empat	100.000.000	
12	Pendataan dan Penataan Dokumen & Arsip	Padang	Jumlah Bahan kelengkapan penetapan arsip DLH	10 meter lari	24.000.000	-		-	-	-	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1.539.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	1.852.000.000	

1	Pengadaan Meubeleu	Padang	Jumlah unit meubeleu yang diadakan	4 jenis	250.000.000	Pengadaan Meubeleu	Padang	Jumlah unit meubeleu yang diadakan	3 jenis	250.000.000	
2	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, scanner	5 jenis	292.000.000	Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, hardisk external	4 jenis	292.000.000	
3	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	8 unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	6 jenis	300.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor	8 paket	220.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor	10 paket	220.000.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Padang	Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan	7 unit	78.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Padang	Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan	10 unit	78.000.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya pemeliharaan AC	27 unit	55.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor	29 unit	55.000.000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi	5 jenis	37.000.000	-		-	-	-	
8	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Padang	Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp dan air	12 bulan	37.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Padang	Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp dan air. Telepon	12 bulan	37.000.000	
9	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis	270.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	270.000.000	
10	-	-	-	-	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya rehab lantai, dapur dan green house serta ruangan	4 paket	350.000.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	68.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	68.000.000	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	60 pegawai	68.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	91 pegawai	68.000.000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur	100%	150.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur	100%	150.000.000	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	16 kali	150.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Padang	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	16 kali	150.000.000	

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian		1. Terpenuhiya peningkatan sumber daya aparatur 2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) 3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan 4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD 5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD	100% BB 100% 100% 100%	419.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian		1. Terpenuhiya peningkatan sumber daya aparatur 2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) 3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan 4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD 5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD	100% BB 100% 100%	771.773.632	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Padang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja DLH	9 dokumen	75.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Padang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja DLH	9 dokumen	232.000.000	
2	Penata usahaanaan keuangan SKPD	Padang	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	12 bulan	220.000.000	Penata usahaanaan keuangan SKPD	Padang	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	12 bulan	220.000.000	
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH	8 dokumen	30.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH	8 dokumen	104.000.000	
								Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	70 peserta rakor		
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD	12 bulan	94.000.000	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Padang	Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD	12 bulan	155.773.632	
5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD		-	-	-	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Padang	Jumlah kegiatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi	10 kegiatan	60.000.000	
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		IPA IPU	5 < IPA < 10 IPU <11	7.390.000.000	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		IPA IPU	5 < IPA < 10 IPU <11	10.496.530.000	
1	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup		Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	1 klaster	320.000.000	Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup		Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	1 klaster	-	
			Jumlah dokumen kajian penanggulangan dan pemulihan pencemaran	1 Dokumen				Jumlah dokumen kajian penanggulangan dan pemulihan pencemaran	1 Dokumen		
2	Pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan hidup		Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	1 percontohan	200.000.000	Pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan hidup		Jumlah percontohan pemulihan pencemaran	1 percontohan	-	
3	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi		Jumlah sungai skala provinsi yang dipantau	12 Sungai	550.000.000	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi		Jumlah sungai skala provinsi yang dipantau	12 Sungai	550.000.000	
			jumlah danau yang dipantau	5 danau				jumlah danau yang dipantau	5 danau		
4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau kualitas	19 Kab/kota	200.000.000	Pemantauan Kualitas Udara Ambien		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pemantau kualitas	19 Kab/kota	200.000.000	

5	Pemantauan pesisir dan laut	udara ambien	jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 kab/kota	80.000.000	Pemantauan pesisir dan laut		udara ambien	jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 kab/kota	80.000.000	
6	Penetapan dan evaluasi baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah cair usaha dan/atau kegiatan		Jumlah kajian baku mutu/peruntukan, status danau	1 dokumen (danau)	290.000.000	Penetapan dan evaluasi baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah cair usaha dan/atau kegiatan		Jumlah kajian baku mutu/peruntukan, status danau	1 dokumen (danau)			
			Jumlah kajian baku mutu industri/kegiatan skala kecil	1 dokumen (2 kegiatan)				Jumlah kajian baku mutu industri/kegiatan skala kecil	1 dokumen (2 kegiatan)			
7	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)		Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	27 kegiatan	300.000.000	Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)	10 kab/kota		Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	27 kegiatan	225.000.000	
8	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3		Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut)	71 objek	360.000.000	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	19 kab/kota		Jumlah kab/kota dan jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut)	19 kab/kota, dan 52 objek usaha dan/atau kegiatan	300.000.000	
9	Pilot proyek pengelolaan LB3		Jumlah pilot project pengelolaan LB3 yang dibangun	1 pilot project	400.000.000	Pilot proyek pengelolaan LB3	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. 50 Kota	Jumlah pilot project pengelolaan LB3 yang difasilitasi	3 pilot project	1.100.000.000		
							Kel. Balai Gadang, Kec. Koto tengah, Kota Padang	Terbangunnya sarana pendukung fasilitas pengolahan Limbah B3 Medis	1 unit cold storage			
10	Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)		Jumlah kab/kota yang dibina dan dinilai	15 Kab/kota	320.000.000	Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	19 Kab/Kota DI Sumatera Barat		Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai	19 Kab/kota	320.000.000	
11	Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH		Jumlah kerusakan lingkungan yang difasilitasi pemulihannya (lahan akses terbuka/biomassa /mangrove/terumbu karang)	3 lokasi	75.000.000	Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	3 lokasi		Jumlah kerusakan lingkungan yang difasilitasi pemulihannya (lahan akses terbuka/biomassa /mangrove/terumbu karang)	1 lokasi	950.000.000	
12	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan		Jumlah objek yang dilakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	50 kegiatan/usaha	350.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan			Jumlah objek yang dilakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan	50 kegiatan/usaha	350.000.000	
13	Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH		Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan	28 objek	200.000.000	Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH	5 objek		Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan	5 objek	70.000.000	
14	Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut		Jumlah objek biomassa yang dipantau	15 objek	835.000.000	Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	5 objek		Jumlah objek gambut yang dipantau	5 objek	835.000.000	

			Jumlah objek gambut yang dipantau	10 objek			7 objek	Jumlah objek mangrove yang dipantau	7 objek		
			Jumlah objek mangrove yang dipantau	12 objek							
			Jumlah objek terumbu karang yang dipantau	10 objek							
15	Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)		Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Kab/Kota	180.000.000	Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	19 Kab/Kota Di Sumatera Barat	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Kab/Kota	180.000.000	
								Jumlah peserta sosialisasi Program Kampung Iklim	60 orang		
16	Pengadaan peralatan, Suporting laboratorium dan bahan Kimia		Jumlah Pengadaan peralatan, Suporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan	1 paket	1.800.000.000	Pengadaan peralatan, Suporting laboratorium dan bahan Kimia	Padang	Jumlah Pengadaan peralatan, Suporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan	23 unit peralatan laboratorium serta bahan kimia	3.506.530.000	
17	Pengujian laboratorium kualitas lingkungan		Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan	125 sampel	400.000.000	Pengujian laboratorium kualitas lingkungan		Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan	125 sampel	400.000.000	
18	Akreditasi laboratorium lingkungan Prov.Sumbar		Jumlah dokumen akreditasi laboratorium yang disusun	1 dokumen	125.000.000	Akreditasi laboratorium lingkungan Prov.Sumbar		Jumlah dokumen akreditasi laboratorium yang disusun	1 dokumen	125.000.000	
19	Pembinaan Laboratorium Lingkungan di Kab/Kota		Jumlah laboratorium lingkungan Kab/Kota yang dibina	10 laboratorium	100.000.000	Pembinaan Laboratorium Lingkungan di Kab/Kota		Jumlah laboratorium lingkungan Kab/Kota yang dibina	10 laboratorium	100.000.000	
20	Pengendalian dan operasional UPTD Laboratorium		Terlaksananya operasional laboratorium lingkungan Prov. Sumbar	1 unit	180.000.000	-		-	-	-	
21	Peningkatan kualitas personil laboratorium Prov. Sumbar		Jumlah personil laboratorium yang ditingkatkan kompetensinya	6 orang	125.000.000	Peningkatan kualitas personil laboratorium Prov. Sumbar		Jumlah personil laboratorium yang ditingkatkan kompetensinya	6 orang	125.000.000	
22	-	-	-	-	-	Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup	Padang	Terlaksananya operasional UPTD. Laboratorium	12 bulan	580.000.000	
23	-	-	-	-	-	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Barat	1 provinsi	Jumlah dokumen RPPRG yang disusun	1 dokumen	500.000.000	
24	-	-	-	-	-	Operasional Pengelolaan Limbah B3	Padang	Terlaksananya operasional pengelolaan limbah B3	1 lokasi	1.000.000.000	
VII	Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan		Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan	60%	1.595.000.000	Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan		Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan	60%	700.283.000	
1	Penyusunan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup		Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun	2 Perda / Pergub / Kepgub	250.000.000	-	-	-	-	-	

2	Peningkatan kapasitas aparaturn Dinas LH Prov dan kab/kota dalam penegakan hukum lingkungan		Jumlah aparaturn yang mengikuti diklat PPLH / PPNS	20 orang	370.000.000	-		-	-	-
3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peraturan yang disosialisasikan	3 peraturan	225.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peraturan yang disosialisasikan	3 peraturan	200.000.000
4	Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan		Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	8 kab/kota	250.000.000	Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan		Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	8 kab/kota	200.000.000
			jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	12 objek				jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan	12 objek	
5	Penaatan hukum lingkungan		Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	8 kasus	500.000.000	Penaatan hukum lingkungan		Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	8 kasus	300.283.000
			Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya	8 kasus				Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya	8 kasus	
VIII	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2%	1.325.000.000	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	2%	1.325.000.000
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah		Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	2 kelompok	220.000.000	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	19 kab/kota di Sumatera Barat	Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	5 kelompok	220.000.000
2	Pembangunan pilot projek 3R di permukiman		Jumlah pilot project pengelolaan 3R yang dibangun	1 pilot project	575.000.000	Pembangunan pilot projek 3R di permukiman	Nagari Pakandangan, Kec.Enam Lingsung, Kab.Padang Pariaman	Jumlah pilot project pengelolaan 3R yang dibangun	1 pilot project	575.000.000
3	Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota		Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19 kab/kota	100.000.000	Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	19 kab/kota di Sumatera Barat	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19 kab/kota	100.000.000
4	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih		Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai	26 kec/kel	330.000.000	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih		Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai	12 kec / 7 kel	330.000.000
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)		Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	19 kab/kota	100.000.000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	19 kab/kota di Sumatera Barat	Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	19 kab/kota	100.000.000
IX	Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	35%	2.260.000.000	Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya		1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	35%	1.420.000.000

			2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	74%		Alam		2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	74%		
			3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	32%				3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	32%		
1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah peserta Rakor PLH	67 Orang	130.000.000	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah peserta Rakor PLH	67 Orang	130.000.000	
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	19 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	19 Kab/Kota		
2	Pembinaan dan evaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan		Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi penyusunan RPPLH berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	19 kab/kota	225.000.000	-		-	-	-	-
3	Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan		Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun	1 dokumen	600.000.000	Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan		Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun	1 dokumen	250.000.000	
			Jumlah instrumen vakuasi ekonomi lingkungan diterapkan	1 instrumen							
4	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup		Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	19 kab/kota	365.000.000	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup		Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	19 kab/kota	250.000.000	
			Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	7 kab/kota				Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya	7 kab/kota		
			Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan	50 orang				Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan	50 orang		
5	Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan		Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	12 Kab/kota	275.000.000	-		-	-	-	
			Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS	50 orang				-	-		
6	Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Ekosistem yang di petakan potensi kawasan.	1 ekosistem	250.000.000	Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Sumatera Barat	Jumlah Ekosistem yang di petakan potensi kawasan.	1 ekosistem	250.000.000	

7	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan pemeliharaan lingkungan		Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pemeliharaan kawasan	20 orang	140.000.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan pemeliharaan lingkungan	Se-Sumatera Barat	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pemeliharaan kawasan	100 orang	140.000.000	
			Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan yang dibina (pemeliharaan danau, das, RTH dll)	5 kelompok				Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan yang dibina (pemeliharaan danau, das, RTH dll)	4 kelompok		
8	Fasilitasi dan model penetapan kawasan pemeliharaan		jumlah kawasan pemeliharaan yang kembangkan	5 kawasan	100.000.000	Fasilitasi dan model penetapan kawasan pemeliharaan	Se-Sumatera Barat	jumlah kawasan pemeliharaan yang kembangkan	5 kawasan	100.000.000	
9	Perlindungan atmosfer dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)		Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca	19 kab/kota	175.000.000	Perlindungan atmosfer dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)	Se-Sumatera Barat	Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca	19 kab/kota	100.000.000	
								Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek GRK	100 orang		
10	-	-	-	-	-	Pembinaan KLHS, RPPLH Daya Dukung Terhadap Dokumen Perencanaan		Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS, RPPLH dan daya dukung terhadap dokumen perencanaannya	19 kab/kota	200.000.000	Pegabungan dari 2 kegiatan yaitu kegiatan pembinaan RPPLH dan DDDTLH berbasis jasa ekosistem dengan pembinaan KLHS
X	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	19%	1.900.000.000	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	19%	957.334.000	
1	Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)		Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima kalpataru	12 orang / kolompok	100.000.000	Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	19 kab/kota di Sumatera Barat	Jumlah calon yang dibina dan dinilai sebagai calon penerima kalpataru	8 orang / kolompok	100.000.000	
2	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)		Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	40 buku	275.000.000	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)		Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak	40 buku	275.000.000	
			Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku DIKPLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat	5 kab/kota							

3	GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)		Jumlah penyuluh multi sektor yang ditingkatkan wawasannya dan diberdayakan dalam penyebarluasan informasi lingkungan hidup	50 orang	90.000.000	GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)	19 kab/kota di Sumatera Barat	Jumlah peserta penyuluhan desa eko edu wisata, jumlah penyuluh multi sektor dan masyarakat yang ditingkatkan wawasannya dan diberdayakan dalam penyebaran informasi lingkungan hidup	180 orang	90.000.000	
4	Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup		Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	100 sekolah	1.225.000.000	Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup		Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	100 sekolah	300.000.000	
								Jumlah peserta Bimtek Tim Adiwiyata	80 orang		
								Jumlah peserta sosialisasi adiwiyata untuk SLTA se-Sumatera Barat	150 orang		
5	Koordinasi Pengelolaan Inovasi Lingkungan		Jumlah inovasi lingkungan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti	10 inovasi	35.000.000	-		-	-	-	-
6	Peningkatan edukasi dan kampanye masyarakat di bidang lingkungan		jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 iven	175.000.000	Peningkatan edukasi dan kampanye masyarakat di bidang lingkungan		jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup	2 iven	192.334.000	
XI	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		Terselenggaranya pengelolaan TPA Sampah Regional	100%	8.700.000.000	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		Terselenggaranya pengelolaan TPA Sampah Regional	100%	22.187.854.200	
1	Pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA Sampah Regional		Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipanta	4 Laporan	200.000.000	Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan TPA Sampah Regional	Payakumbuh dan Solok	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	4 laporan	305.678.000	
								Jumlah perizinan ang diajukan	2 perizinan		
								Jumlah pemantauan pembangunan fisik yang dilakukan	2 TPA		
2	Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional		Tersedianya infrastruktur di TPA Sampah Regional	2 lokasi	1.350.000.000	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Regional	Payakumbuh dan Solok	Terpeliharanya infrastruktur di TPA Sampah Regional	2 lokasi	1.350.000.000	
3	Pengendalian dan operasional UPTD TPA Sampah Regional		Terlaksananya operasional TPA	2 TPA	7.150.000.000	Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	Payakumbuh dan Solok	Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan TPA Sampah Regional Solok	100%	14.926.880.000	
								Tersedianya alat berat operasional TPA Sampah Regional	4 unit		
4	-		-	-	-	Pengadaan Tanah untuk Pengembangan TPA Sampah Regional	Payakumbuh	Luas pengadaan tanah	4,8 Ha	5.605.296.200	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena isu lingkungan hidup di setiap wilayah dapat dikatakan serupa. Usulan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi Program/Kegiatan tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang relevan dengan kondisi lima tahun kedepan yaitu :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industry, perdagangan, koperasi, UMKM dan Peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Maka dari 10 prioritas di atas, yang berkaitan erat dengan Lingkungan Hidup adalah prioritas nomor 10 yaitu Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana dengan program strategis sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- b. Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- e. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f. Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

Selain melalui 6 (enam) program strategis di atas, dukungan OPD Lingkungan Hidup dalam pencapaian sasaran tersebut di atas juga melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta program pendukung lainnya berupa Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara teknis selain dukungan bagi pencapaian sasaran pokok arah kebijakan pembangunan pada RPJM ke 4 dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup Tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup bertujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan yang tertata.
2. Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak.
3. Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam.
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2017-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2017-2021 seperti pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada tahun 2019
1.	Terwujudnya tata lingkungan	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	1. Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbang	72%
			2. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	76%
2.	Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	10%
3.	Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam	Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	13%
4.	Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatkan kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	19%
		2. Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	BB

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program.

Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat direncanakan menjalankan 11 Program dan 70 kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Uraian rencana Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2020 dapat terlihat pada tabel 3.3 (terlampir).

Tabel 3.3
Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022

Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				19.700.000.000				21.670.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.883.000.000			100%	3.171.300.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	Padang	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	33.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet	Padang	12 bulan	350.000.000	APBD		12 bulan	385.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenagapengamanan dan sopir kantor	Padang	13 bulan	1.500.000.000	APBD		13 bulan	1.650.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Padang	12 bulan	70.008.220	APBD		12 bulan	77.009.042
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Padang	15 jenis	50.000.000	APBD		15 jenis	55.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	Padang	10 komponen	8.000.000	APBD		10 komponen	8.800.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah Media/surat kabar harian yang disediakan	Padang	12 bulan	33.265.000	APBD		12 bulan	36.591.500
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	Padang	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan	66.000.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar daerah	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	Padang	33 kali	590.414.780	APBD		33 kali	649.456.258
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Padang	12 bulan	71.312.000	APBD		12 bulan	78.443.200
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan yang dialokasikan premi asuransinya	Padang	10 kendaraan roda empat	120.000.000	APBD		10 kendaraan roda empat	132.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.850.000.000			100%	3.135.000.000

		Pengadaan Meubeleur	Jumlah unit meubeleur yang diadakan	Padang	3 jenis	250.000.000	APBD		3 jenis	275.000.000
		Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi	Tersedianya PC, laptop/notebook, printer, hardisk external	Padang	4 jenis	650.000.000	APBD		4 jenis	715.000.000
		Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya alat-alat studio, komunikasi dan informasi	Padang	6 jenis	640.000.000	APBD		6 jenis	704.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya paket pemeliharaan gedung kantor	Padang	10 paket	220.000.000	APBD		10 paket	242.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan	Padang	10 unit	78.000.000	APBD		10 unit	85.800.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor	Padang	29 unit	55.000.000	APBD		29 unit	60.500.000
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehab lantai, dapur dan green house serta ruangan	Padang	4 unit	350.000.000	APBD		4 unit	385.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telp dan air. Telepon	Padang	12 bulan	37.000.000	APBD		12 bulan	40.700.000
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	9 jenis	570.000.000	APBD		9 jenis	627.000.000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100%	105.000.000			100%	115.500.000
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT	Padang	91 pegawai	105.000.000	APBD		91 pegawai	115.500.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur		100%	232.000.000			100%	255.200.000
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan	Padang	16 kali	232.000.000	APBD		16 kali	255.200.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	1. Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur 2. Nilai LAKIP SKPD (minimal BB) 3. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan 4. Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra SKPD 5. Persentase kesesuaian usulan renja dengan RPJMD		100% BB 100% 100% 100%	686.000.000			100% BB 100% 100% 100%	754.600.000
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kerja DLH	Padang	9 dokumen	232.000.000	APBD		9 dokumen	255.200.000
		Penata usahaan keuangan SKPD	Tertibnya administrasi keuangan SKPD	Padang	12 bulan	220.000.000	APBD		12 bulan	242.000.000

			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran DLH	Padang	8 dokumen		104.000.000	APBD		8 dokumen	114.400.000
				Jumlah peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			70 peserta rakor				70 peserta rakor	
			Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Pembayaran Honor pengawasan dan pengendalian asset SKPD	Padang	12 bulan		70.000.000	APBD		12 bulan	77.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Jumlah kegiatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Padang	10 kegiatan		60.000.000	APBD		10 kegiatan	66.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IPA IPU		5 < IPA < 10 IPU < 11		4.899.000.000			5 < IPA < 10 IPU < 11	5.388.900.000
			Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai skala provinsi yang dipantau		12 Sungai		350.000.000	APBD		12 Sungai	385.000.000
				jumlah danau yang dipantau		5 danau					5 danau	
			Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan daerah (PROPERDA)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	10 kab/kota	27 kegiatan		225.000.000	APBD		27 kegiatan	247.500.000
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Jumlah kab/kota dan jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 (penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut)	19 kab/kota	19 kab/kota, dan 52 objek usaha dan/atau kegiatan		200.000.000	APBD		19 kab/kota, dan 52 objek usaha dan/atau kegiatan	220.000.000
			Pilot proyek pengelolaan LB3	Jumlah pilot project pengelolaan LB3 yang difasilitasi	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. 50 Kota	3 pilot project		2.200.000.000	APBD		3 pilot project	2.420.000.000
				Terbangunnya sarana pendukung fasilitas pengolahan Limbah B3 Medis	Kel. Balai Gadang, Kec. Koto tangah, Kota Padang	1 unit cold storage					1 unit cold storage	
			Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)	Jumlah kab /kota yang dibina dan dinilai	19 Kab/Kota di Sumatera Barat	19 Kab/kota		225.000.000	APBD		19 Kab/kota	247.500.000
			Penanggulangan dan pemulihan kerusakan LH	Jumlah dokumen kajian study kelayakan rencana pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) yang disusun	1 dokumen	Kab. Sijunjung		2000.000.000	APBD		1 lokasi	220.000.000
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah objek yang dilakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan		50 kegiatan/ usaha		404.000.000	APBD		50 kegiatan/ usaha	165.000.000
			Pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan LH	Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti	5 objek	5 objek		200.000.000	APBD		5 objek	220.000.000

				dengan upaya upaya pencegahan							
			Pemantauan kualitas lahan dan biota Laut	Jumlah objek gambut yang dipantau	5 objek	5 objek	80.000.000	APBD		5 objek	165.000.000
				Jumlah objek mangrove yang dipantau	7 objek	7 objek				7 objek	
			Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	19 Kab/Kota di Sumatera Barat	19 Kab/Kota	180.000.000	APBD		19 Kab/Kota	198.000.000
				Jumlah peserta sosialisasi Program Kampung Iklim		60 orang			60 orang		
			Pengadaan peralatan, Suporting laboratorium dan bahan Kimia	Jumlah Pengadaan peralatan, Supporting laboratorium dan bahan Kimia yang disediakan	Padang	23 unit peralatan laboratorium serta bahan kimia	10.000.000	APBD		23 unit peralatan laboratorium serta bahan kimia	11.000.000
			Pengujian laboratorium kualitas lingkungan	Jumlah laporan hasil pengujian kualitas lingkungan	Padang	125 sampel	0	APBD		125 sampel	220.000.000
			Akreditasi laboratorium lingkungan Prov.Sumbar	Jumlah dokumen akreditasi laboratorium yang disusun	Padang	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	137.500.000
			Peningkatan kualitas personil laboratorium Prov. Sumbar	Jumlah personil laboratorium yang ditingkatkan kompetensinya	Padang	6 orang	0	APBD		6 orang	55.000.000
			Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup	Terlaksananya operasional UPTD. Laboratorium	Padang	12 bulan	625.000.000	APBD		12 bulan	275.000.000
			Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Barat	Jumlah dokumen RPPRG yang disusun	1 provinsi	1 dokumen	0	APBD		1 dokumen	202.400.000
			Pemantauan pesisir dan laut	jumlah kabupaten/kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam	6 kab/kota	0	APBD		6 kab/kota	100.000.000
			Operasional Pengelolaan Limbah B3	Terlaksanya operasional pengelolaan limbah B3	Padang	1 lokasi	0				
			Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap hukum lingkungan		60%	1.585.000.000			60%	1.743.500.000
			Peningkatan kapasitas aparatur Dinas LH Prov dan kab/kota dalam penegakan hukum lingkungan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPLH / PPNS		20 orang	0			20 orang	407.000.000
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan		3 peraturan	595.000.000	APBD		3 peraturan	247.500.000

			Pembinaan hukum dan perizinan lingkungan	Jumlah instansi lingkungan hidup dan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan		8 kab/kota	390.000.000	APBD		8 kab/kota	429.000.000
				jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan perizinan		12 objek				12 objek	
			Penaatan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum		8 kasus	600.000.000	APBD		8 kasus	660.000.000
				Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat difasilitasi penyelesaiannya		8 kasus				8 kasus	
			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		2%	1.167.000.000			2%	1.283.700.000
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan / kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah	19 kab/kota di Sumatera Barat	5 kelompok	620.000.000	APBD		5 kelompok	682.000.000
			Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan	19 kab/kota di Sumatera Barat	19 kab/kota	150.000.000	APBD		19 kab/kota	165.000.000
			Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbang Bersih	Jumlah kecamatan/kelurahan yang dibina dan dinilai		12 kec / 7 kel	297.000.000	APBD		12 kec / 7 kel	326.700.000
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah kab/kota yang dimonitoring/dievaluasi pelaksanaan PPSP	19 kab/kota di Sumatera Barat	19 kab/kota	100.000.000	APBD		19 kab/kota	110.000.000
			Program Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1) Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar		35%				35%	
				2) Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan		74%	3.268.000.000			74%	3.594.800.000
				3) Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria		32%				32%	
			Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta Rakor PLH		67 Orang	0	APBD		67 Orang	198.000.000
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi		19 Kab/Kota				19 Kab/Kota	
			Valuasi ekonomi lingkungan melalui Insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan	Jumlah instrumen valuasi ekonomi lingkungan (insentif, disinsentif dan pendanaan lingkungan) yang disusun		1 dokumen	980.750.000	APBD		1 dokumen	1.078.825.000
			Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya		19 kab/kota				19 kab/kota	
				Jumlah kab/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya		7 kab/kota	400.000.000	APBD		7 kab/kota	

									440.000.000	
				Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait dokumen lingkungan		50 orang		50 orang		
			Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Ekosistem yang di petakan potensi kawasan.	Sumatera Barat	1 ekosistem	0	APBD	1 ekosistem	440.000.000
			Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan pemeliharaan lingkungan	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan pemeliharaan kawasan	Se-Sumatera Barat	100 orang	800.000.000	APBD	100 orang	880.000.000
				Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan yang dibina (pemeliharaan danau, das, RTH dll)		4 kelompok				
			Perlindungan atmosfer dari perusak ozon (BPO) dan emisi gas rumah kaca (GRK)	Jumlah Kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca	Se-Sumatera Barat	19 kab/kota	200.000.000	APBD	19 kab/kota	220.000.000
				Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek GRK		100 orang				
			Pembinaan KLHS, RPPLH Daya Dukung Terhadap Dokumen Perencanaan	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS, RPPLH dan daya dukung terhadap dokumen perencanaannya	Padang	19 kab/kota	307.250.000	APBD	19 kab/kota	337.975.000
			Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah ekosistem yang dipetakan potensi kawasannya		1 ekosistem	400.000.000	APBD		5000.0000.00
			Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur TPA Regional	Terpelihara infrastruktur di TPA sampah Regional	Payakumbuh dan Solok	2 lokasi	90.000.000	APBD		0
			Pembebasan tanah untuk pengembangan TPA Regional Payakumbuh	Luas tanah yang dibebaskan		4,8 ha	90.000.000	APBD		0
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD	Padang	2 dokumen	0	APBD		0
			Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan		19%	1.853.000.000		19%	2.038.300.000
			Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah calon yang dibina dan dinilai sebagai calon penerima kalpataru	19 kab/kota di Sumatera Barat	8 orang / kolompok	150.000.000	APBD	8 orang / kolompok	165.000.000
			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Jumlah buku DIKPLHD Prov. Sumbar yang dicetak		40 buku	285.000.000	APBD	40 buku	313.500.000
			GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)	Jumlah peserta penyuluhan desa eko edu wisata, jumlah penyuluh multi sektor dan masyarakat yang ditingkatkan wawasan lingkungan dan diberdayakan dalam penyebaran informasi lingkungan hidup	19 kab/kota di Sumatera Barat	180 orang	800.000.000		180 orang	880.000.000
			Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata		100 sekolah	318.000.000	APBD	100 sekolah	349.800.000
				Jumlah peserta Bimtek Tim Adiwiyata		80 orang				

			Jumlah peserta sosialisasi adiwiyata untuk SLTA se-Sumatera Barat		150 orang				150 orang	
			Peningkatan edukasi dan kampanye masyarakat di bidang lingkungan	jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup		2 iven	300.000.000	APBD	2 iven	330.000.000
			Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Terselenggaranya pengelolaan TPA Sampah Regional		100%	172.000.000		100%	189.200.000
			Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan TPA Sampah Regional	Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang dipantau	Payakumbuh dan Solok	4 laporan	10.000.000	APBD	4 laporan	11.000.000
		Jumlah perizinan ang diajukan		2 perizinan		2 perizinan				
		Jumlah pemantauan pembangunan fisil yang dilakukan		2 TPA		2 TPA				
			Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya operasional TPA Sampah Regional Payakumbuh dan TPA Sampah Regional Solok	Payakumbuh dan Solok	100%	162.000.000	APBD	100%	156.200.000
				Tersedianya alat berat operasional TPA Sampah Regional		4 unit			4 unit	

IV

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 - 2021 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.

RENJA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang dan sekretariat pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2021 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani arahan perencanaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA-OPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjamin konsistensi antara rancangan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.